



# Buletin Parlementaria

Nomor 1186/II/II/2022 • Februari 2022

## Jelang IPU ke-144, DPR Pastikan Fasilitas dan Prokes Optimal



3 Tegaskan RI Negara  
Maritim, Gus Muhaimin  
Dorong Pemerintah  
Optimalkan SDM Kelautan



20 Di Markas PBB, Hafisz  
Tohir Sampaikan  
Pancasila Mampu  
Satukan Masyarakat



9 772614 339005

# Jelang IPU ke-144, DPR Pastikan Fasilitas dan Prokes Optimal

**K**etua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meninjau lokasi penyelenggaraan Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings ke-144 di Nusa Dua, Bali. DPR RI akan bertindak sebagai tuan rumah pertemuan parlemen seluruh dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 20-24 Maret 2022 mendatang.

Di sela-sela kunjungan ke Bali Convention Center dan Hotel Westin ini, Ketua DPR menggelar rapat koordinasi dengan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhiela Fararez, Anggota DPR RI Evita Nursanty, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar serta jajaran pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam rakor tersebut, Puan menekankan pentingnya fasilitas pendukung bagi seluruh peserta yang hadir termasuk awak media. “Koneksi internet harus kita pastikan tidak terkendala dan fasilitas pendukung lain harus mampu menunjang dan memudahkan semua pihak.” ujar Puan di Nusa Dua, Bali, Senin (21/2).

Ia menambahkan agar gelaran ini diatur sebaik mungkin agar tidak mengganggu kenyamanan warga lain yang berada di tempat yang sama. “Di bandara, saya minta agar dibuatkan *line* khusus untuk peserta IPU agar semua mengantre di tempat yang sama, delegasi IPU biasa mengantre dan mengurus segala sesuatunya sendiri, tapi kita harus pastikan antrean ini tertib, teratur dan tidak menyulitkan peserta maupun masyarakat,” tambahnya.

Untuk mendukung pelaksanaan IPU ke-144, DPR RI berkoordinasi dengan berbagai Kementerian/ Lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan

atau sistem gelembung untuk seluruh delegasi dan panitia selama kegiatan berlangsung. Sistem *bubble* adalah sistem koridor perjalanan yang bertujuan



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus, dan Pimpinan BKSAP DPR RI meninjau lokasi penyelenggaraan IPU Assembly & Related Meetings ke-144. Foto: Bianca/nvl

HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/ Satgas Covid Nasional. “Saya juga minta koordinasi lebih ketat dengan BNPB dan Satgas Covid-19 terkait pencegahan Covid. Khususnya mengenai fasilitas karantina bila ada delegasi yang datang dan dari hasil tes PCR ternyata positif,” ujar Puan.

Selain itu, DPR RI juga menyiapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan IPU ke-144. Untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, DPR pun menerapkan sistem *bubble*

membatasi interaksi hanya dengan individu dalam gelembung tersebut. Puan pun menegaskan sistem itu harus dilakukan dengan pengawasan ketat.

“Kita harus tetap disiplin pakai prokes. Semua diperiksa. Jangan biarkan siapapun masuk ke lokasi acara tanpa identitas resmi dari panitia. *Hospitality* saat ini bukan lagi berarti layanan makanan berlimpah, tapi *hospitality* yang memprioritaskan profesionalitas. Kita harus professional,” ucap politisi PDI-Perjuangan tersebut. ■

bia/sf



# Tegaskan RI Negara Maritim, Gus Muhaimin Dorong Pemerintah Optimalkan SDM Kelautan

**W**akil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri *Stadium General*

bersama Taruna Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan dan Kelautan Puger, Jember, Jawa Timur, Minggu (20/2). Gus Muhaimin mengapresiasi prestasi dan kemajuan SMK tersebut yang luar biasa, sebab lulusannya juga bisa langsung diterima di dunia kerja bahkan hingga ke luar negeri.

“Saya bersyukur dan bangga atas kemajuan dan prestasi SMK Perikanan dan Kelautan ini. Ini merupakan pilihan yang tepat sebagai negara maritim, sebagai negara yang prosentase kelautan yang jauh lebih besar dibanding daratannya,” kata Gus Muhaimin dalam keterangannya, Senin (21/2).

Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, SMK Perikanan dan Kelautan merupakan wadah pendidikan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama kaum muda. Gus Muhaimin menilai kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara maritim harus terus dikembangkan dengan cara rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh.



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.  
Foto: Jaka/nvl

Dengan begitu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu optimis Indonesia bisa berjaya dan kaya raya jika mampu memanfaatkan potensi besar lautnya. “Kita masih terus membutuhkan SDM-SDM yang tangguh, yang bisa membuat Indonesia kaya raya dari laut kita tercinta,” tutur Gus Muhaimin.

Oleh Karena itu, Gus Muhaimin mendorong pemerintah untuk memberikan porsi perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan SDM Kelautan dan Perikanan Indonesia. “Saya minta pemerintah memberi perhatian sungguh-sungguh dalam pembangunan SDM kelautan. SDM kelautan bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa kita,” ujar Gus Muhaimin. ■ sf



## PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

## KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

## WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

## PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

## PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

## W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto S.Sos., M.A. (Kabag Media Cetak)  
Suciati, S.Sos. (Kabag Media Analisis)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kabag MedSos dan Website)

## REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

## REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

## SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

## ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrull, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbiani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

## FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari

## ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianty Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita

## INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

## ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

## PENERBITAN

### PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

### PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kabag Produksi)

### DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

### IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Riffqi Hidayat, S.E

### PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiowati, S.Kom (Kabag Distribusi)

### KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Yudi Kresna

### ADMINISTRASI

### STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# Puan Maharani Pandu Pelantikan 2 Anggota PAW DPR



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat memandu pelantikan dua anggota PAW DPR RI untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Foto: Jaka,Runi/nvl

**K**etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memandu pelantikan dua anggota pengganti antarwaktu (PAW) DPR RI untuk sisa masa jabatan 2019-2024 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung Jumat (18/2).

Dua anggota PAW yang dilantik yakni Mohammad Khairul Amri dari Fraksi Partai Nasdem dapil Jawa Timur II, menggantikan Hasan Aminuddin. Kemudian, Hendrik H Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat dapil Sumatera Utara I, menggantikan almarhum Abdul Wahab Dalimunthe.

Pengucapan sumpah jabatan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI. “Sebelum memangku jabatan anggota dewan perwakilan rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah berjanji menurut agama masing-masing, apakah saudara saudara bersedia?” tanya Puan kepada dua anggota PAW

di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (18/2). “Bersedia,” jawab dua anggota PAW menyatakan kesediaannya.

“Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan, mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia,” tutur Puan. Berikut adalah sumpah Anggota PAW DPR RI yang dipandu Puan.

“Bagi Saudara yang beragama Islam, Demi Allah saya bersumpah, bagi Saudara yang beragama Katolik demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, dan UUD NKRI 1945,” pandu Puan yang diikuti dua Anggota PAW DPR RI.

“Bahwa saya, dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya, akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi Saudara yang beragama Katolik, semoga tuhan menolong saya,” demikian bunyi sumpah yang dibacakan kedua anggota PAW.

Diketahui, pelantikan Haerul Amri dan Hendrik H Sitompul dilaksanakan berdasarkan petikan Keputusan Presiden Nomor 19/P Tahun 2022 tertanggal 15 Februari 2022 tentang Peresmian Pergantian Antarwaktu Anggota DPR dan Anggota MPR Sisa Masa Jabatan 2019-2024. ■ hal/sf



# Paripurna DPR Setujui Komisioner KPU Bawaslu Periode 2022-2027

anggota Komisi pemilihan Umum dan 10 nama calon anggota Badan Pengawas Pemilu masa jabatan 2022-2027,” papar Doli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/2).

Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan, Komisi II DPR RI menaruh harapan besar kepada para komisioner KPU dan anggota Bawaslu terpilih agar mampu bekerja keras, bekerja sehat, dan bekerja tuntas. Utamanya, dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 secara demokratis, berintegritas, dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Oleh karena itu, sambung Doli, untuk mendukung proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang taat asas diperlukan sistem pendukung yang sangat memadai yaitu penyelenggara pemilu yang mandiri, independen, profesional secara kelembagaan, dan secara personal mampu bersikap tegas, berlaku adil, memiliki integritas yang kuat, dan berkompeten.

“Komisi II DPR RI meminta

kepada para komisioner KPU dan Bawaslu masa jabatan 2022-2027 agar kedepan mampu membangun hubungan kerja sama yang konstruktif antara DPR RI sebagai pembuat undang-undang dan KPU dan maupun Bawaslu sebagai pelaksana undang-undang.” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III itu.

Adapun tujuh nama yang akan menjabat sebagai Komisioner KPU masa jabatan 2022-2027 antara lain adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Sedangkan lima anggota Bawaslu terpilih yaitu Lolly Suhent, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda. ■ dep/sf



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat menyampaikan laporan Komisi II DPR RI terkait tahapan seleksi calon anggota KPU RI dan calon anggota Bawaslu RI. Foto: Jaka/nvl

Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyetujui 7 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 5 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi II DPR RI untuk ditetapkan menjadi Komisioner KPU dan Anggota Bawaslu periode masa bakti 2022-2027.

Dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, Komisi II DPR RI telah melaksanakan seluruh tahapan seleksi calon anggota KPU RI dan calon anggota Bawaslu RI masa jabatan

2020-2027 yang dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

“Komisi II DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan rapat dalam rangka persiapan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu dengan tahapan seleksi, pertama pada tanggal 7 Februari 2022, Komisi II DPR RI dengan didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI melakukan konferensi pers di hadapan wartawan, baik media cetak maupun media elektronik terkait pengumuman secara resmi kepada publik dengan tujuan meminta masukan dari masyarakat terhadap 14 nama calon

# Komisi I Pantau Pembangunan Infrastruktur TIK di Sumsel

**W**akil Ketua Komisi DPR RI Bambang Kristiono menyampaikan dengan adanya pandemi Covid-19, maka transformasi digital merupakan sebuah keharusan. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, bahwa pemerintah memantapkan langkah untuk mempercepat realisasi transformasi digital pada 2024. Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai *leading sector*-nya.

“Akselerasi pembangunan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) diwujudkan dalam berbagai program antara lain penyediaan akses internet, pembangunan BTS, dan Palapa Ring. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke

Sumatera Selatan dalam rangka melihat perkembangan pembangunan infrastruktur TIK di Sumatera Selatan menuju Transformasi Digital 2024,” ungkap Bambang saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan BAKTI Kominfo di Kota Palembang, Sumsel, Rabu (23/2).

“Dari paparan BAKTI, bahwa sudah terlihat produktivitas yang diberikan BAKTI untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat namun harus diakui juga, dibanyak sisi masih banyak kekurangan yang harus tetap disempurnakan sebagaimana sarana-sarana yang diberikan para anggota dewan dan dinas-dinas di Sumatera Selatan,” ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI tersebut.

Lebih lanjut, Bambang berharap pelayanan dan dukungan Pemerintah

terutama terkait internet bisa terus ditingkatkan. Sehingga, kondisi ideal telekomunikasi di Sumsel bisa berjalan dengan baik. “Di beberapa tempat masih banyak *blankspot*-nya, hal ini perlu ada perbaikan-perbaikan,” ujar Bambang menutup pernyataannya.

Sementara, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan bahwa pembangunan TIK oleh BAKTI Kominfo di Sumsel masih sesuai dengan target. “Ada sekitar 416 desa lagi yang akses internetnya itu yang belum baik. Insya Allah sebelum tahun 2024 ini sudah bisa diselesaikan. Jadi secara umum progress pembangunan TIK yang diinisiasi oleh pemerintah baik di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) maupun di daerah yang non 3T sudah sesuai rencana,” jelas Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.

Sebagaimana diketahui Pelaksanaan penyediaan Jasa Akses Internet merupakan amanat dari Nawacita, yaitu terbangunnya infrastruktur yang menunjang konektivitas antar wilayah secara terintegrasi. BAKTI hadir untuk mengatasi kesenjangan digital dengan melakukan pembangunan akses *broadband*, khususnya di daerah yang belum terjangkau. Layanan ini menyediakan akses internet di Sekolah, Balai Latihan Kerja, Puskesmas, Balai Desa, Kantor pemerintahan serta lokasi publik di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). ■ *skr/sf*



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan para mitra kerja di Palembang, Sumatera Selatan. Foto: Singgih/nvl

# Komisi I Apresiasi Deteksi Dini Binda Bali terhadap Agenda Internasional di Pulau Dewata



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto saat memimpin pertemuan dengan Kepala Binda Bali beserta jajarannya. Foto: Agung/nvl

**T**im Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas deteksi dini dan cegah dini Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Bali terhadap rencana pelaksanaan tiga agenda internasional di provinsi tersebut pada beberapa waktu mendatang. Mulai dari IPU pada bulan Maret 2022, P20 pada bulan September 2022 hingga KTT G20 pada bulan November 2022 nanti.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menyebutkan upaya deteksi dari Binda Bali sangat penting, sebab akan menjadi rujukan kebijakan pemerintah dan para pemangku kepentingan. “Agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung dalam situasi aman, lancar serta terkendali,” kata Anton bertindak sebagai Ketua Tim Kunker ini saat

pertemuan dengan Kepala Binda Bali beserta jajarannya di Denpasar, Bali, Sabtu (19/2).

Anton pun berharap, kelancaran kegiatan internasional di Bali nanti akan dapat meningkatkan prospek dan nilai tambah Indonesia dalam kancah dunia internasional. “Maka kami mendorong Binda Bali untuk terus berkoordinasi dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan deteksi dini terhadap situasi dan kondisi bali,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Koordinasi dan sinergi itu diperlukan agar pelaksanaan tiga acara tersebut dapat berlangsung sukses, tidak hanya dari segi ekonomi tapi juga dari segi geopolitik di kancah internasional. Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin turut menanyakan kepada Binda Bali soal kemungkinan regulasi yang

akan diterapkan bagi para delegasi asing yang akan mendatangi acara internasional itu.

Atau memang ada kekhususan bagi delegasi tersebut untuk dapat memperoleh pelonggaran ketika masuk ke Bali. Sementara wisatawan asing reguler, menurut Nurul, harus melewati prosedur ketat, hal itu menciptakan iklim yang tidak terlalu baik bagi pemulihan ekonomi khususnya sektor pariwisata di Pulau Dewata.

Padahal warga luar negeri yang masuk ke Bali juga telah melewati proses pemeriksaan Covid di negara masing-masing. Ia menilai prosedur untuk berwisata saat ini masih kurang mendukung pemulihan sektor tersebut. “Jadi mungkin nanti (Binda Bali) bisa kasih masukan ini ke pihak terkait saat rapat gabungan,” pesan politisi Partai Golkar itu. ■ ah/sf

# Pembangunan Pesat di Kota Batam Harus Sesuai dengan RTRW Regional Maupun Nasional

**K**etua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan pembangunan yang pesat di Kota Batam harus tetap sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik regional maupun nasional. Sebab, menurutnya, meskipun terjadi pandemi, pembangunan ekonomi dan infrastruktur di kota yang berbatasan dengan Negara Singapura ini tidak terhenti. Sehingga, dengan mengikuti aturan RTRW tersebut, pembangunan yang pesat ini diharapkan tidak menyalahi tata ruang, serta pemanfaatan ruangnya

Ketua Komisi II DPR RI  
Ahmad Doli Kurnia Tandjung.  
Foto: Ridwan/rvl

juga akan optimal.

“Saya bisa menilai Kota Batam ini, kota yang tidak mati. Artinya pergerakan ekonominya terus masih bisa berjalan, pembangunan konstruksinya juga saya sampaikan tidak berhenti. Artinya, Kota Batam walaupun dalam masa pandemi

masih bisa terus membangun,”  
jelas Doli  
usai  
memimpin

pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Kota Batam, di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (21/2).

Selain itu, ia berharap dengan penyatuan pengelolaan BP Batam dan Kota Batam secara administratif atas terbitnya PP Nomor 62 Tahun 20219, maka secara otomatis pembangunan di Batam harus lebih mudah dan tidak terjadi konflik antarkedua institusi tersebut. Persoalan seperti ego sektoral hingga miskomunikasi antara dua institusi di Batam ini diharapkan tidak terjadi lagi, sehingga menjadi momentum untuk percepat semua



## KOTA BATAM WALAUPUN DALAM MASA PANDEMI MASIH BISA TERUS MEMBANGUN

program pembangunan. “Jadi, dua institusi ini punya visi yang sudah sejak lama yang seharusnya bisa terimplementasikan dengan baik dengan dipimpin satu orang,” tambah politisi Partai Golkar ini.

Diketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan PP Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. PP tersebut

menyudahi dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan Kota Batam yang terjadi sebelumnya. Dengan adanya PP tersebut diatur bahwa Wali Kota Batam selain sebagai kepala pemerintahan daerah juga sebagai *ex-officio* Kepala BP Batam (Pasal 2A poin 1(a)). ■ rdn/sf





# Kunjungi Samarinda, Komisi II Evaluasi Kinerja Pemda, Seleksi ASN, dan Program Prioritas Pertanahan



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim saat bertukar cenderamata usai memimpin pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili Pj. Sekda Kaltim. Foto: Oji/nvl

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menjelaskan, salah satu maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI adalah untuk membahas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan publik

di masa pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa proses reformasi birokrasi harus tetap dijaga dan dipastikan keberlangsungannya di tengah pandemi Covid-19.

“Kami juga ingin mendengar evaluasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. Sejauh mana prosesnya berjalan dan apa saja yang menjadi kendalanya,” imbuh Luqman saat memimpin pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili Pj. Sekda Kaltim didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Kepala Ombudsman Kaltim, dan Kakanwil BPN Provinsi Kaltim di ruang rapat Tepiani, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (21/2).

Luqman menambahkan, Komisi II DPR RI perlu mendengar langsung hasil evaluasi pelaksanaan program-program prioritas pertanahan dan penanganan permasalahan kasus pertanahan di Kaltim. “Kami sudah lama mendengar adanya persoalan sengketa lahan dalam berbagai proyek infrastruktur di Kaltim melibatkan banyak pihak. Pembebasan lahan ada yang terkendala status kawasan hutan, perkebunan milik pemerintah dan swasta, adapula adalah lahan milik transmigran serta lahan yang diklaim milik masyarakat adat. Kami ingin tahu sejauh mana perkembangannya,” pungkas Luqman.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI ini menambahkan mengenai penyelesaian kasus beberapa sengketa pertanahan di Kaltim yang masih menggantung sampai hari ini. Ke depan Luqman berharap penyelesaian ganti rugi atau ganti untung sebagian tanah milik rakyat di ruas Tol Samarinda-Balikpapan yang belum selesai dapat segera diselesaikan.

Turut hadir dalam kunjungan kerja Komisi II ke Samarinda, Kaltim tersebut, Anggota Komisi II DPR RI yaitu Endro Suswantoro Yahman, Rifqinizami Karsayuda, Bagus Adhi Mahendra Putra, Sodik Mudjahid, Supriyanto, Yanuar Prihatin, Nurhuda, Wahyu Sanjaya, Rezka Oktoberia, Teddy Setiadi, KH. Aus Hidayat Nur, Ibnu Mahmud Bilaluddin, Dian Istiqomah dan IIP Miftahul Choiry. ■ oji/sf

# Komisi III Apresiasi Polda Kalteng dalam Pencegahan Covid-19

**W**akil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengapresiasi peran kepolisian dalam pencegahan penularan virus Covid-19 di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang saat ini mengalami lonjakan kasus. Desmond mengimbau warga Kalteng juga harus berani untuk divaksin dosis I, II, termasuk vaksin dosis III atau *booster*.

“Peran polisi di Kalimantan Tengah sangat luar biasa, hanya tinggal kepatuhan dari warga saja yang perlu ditingkatkan. Jangan lupa juga vaksin *booster* bagi warga yang sudah melakukan vaksin dosis II dengan rentang waktu 6 bulan,” ujar Desmond saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Polda

Kalteng, di Palangka Raya, Kalteng, Selasa (22/2).

Politisi Partai Gerindra itu menilai edukasi dan sosialisasi harus selalu diberikan pada masyarakat. Edukasi mengenai vaksin, tak hanya pemerintah tapi berbagai pihak harus mengedukasi sesama. Serta hal mendasar seperti penggunaan masker dan mencuci tangan. “Penerapan



## OPERASI YUSTISI DILAKUKAN DENGAN PATROLI DAN PEMBAGIAN 2.500 MASKER PADA MASYARAKAT

protokol kesehatan (*prokes*) 3M dan Operasi Yustisi pun harus terus dilakukan dan disosialisasikan pada masyarakat,” pesan Desmond.

Sementara itu Kapolda Kalteng Irjen Pol Nanang Avianto mengatakan, Operasi Yustisi dilakukan dengan patroli dan pembagian 2.500 masker pada masyarakat. Selain tempat hiburan malam (THM), kafe, dan tempat ramai lainnya. Bahkan saat patroli juga menyisir kawasan Sanaman Mantikei, Palangka Raya.

Kapolda Kalteng menambahkan, para personel gabungan Operasi Yustisi juga melakukan sosialisasi pada warga. “Personel turut bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat Kalteng, jika masyarakat sehat makan roda perekonomian pun akan berjalan,” tutup Nanang. ■ eno/sf



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI ke Polda Kalteng. Foto: Kresno/nvl

# Komisi III Dukung Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana BNNP Kaltara

**A**nggota Komisi III DPR RI Rudy Mas'ud memberikan dukungannya kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk memperkuat personel, dalam hal ini sumber daya manusia (SDM), serta penguatan sarana dan prasarana BNNP Kaltara yang sampai saat ini masih minim.

“Nanti saat rapat dengan BNN di Jakarta akan saya sampaikan, untuk di wilayah perbatasan personel BNNP Kaltara harus ditambah, karena ini adalah daerah perbatasan langsung dengan negara tetangga. Jadi intinya bagaimana menambah personel juga sarana dan prasarana harus diperkuat di daerah ini,” tegas Rudy saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan jajaran BNNP Kaltara di Tarakan, Kaltara, Senin (21/2).

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan, BNNP Kaltara yang terletak di daerah perbatasan harus lebih waspada dalam menjaga dan melakukan pengamanan terhadap jalur peredaran narkoba yang berasal dari negara tetangga. Termasuk mengantisipasi peredaran narkoba melalui jalur darat, laut, maupun udara. Berdasarkan penjelasan BNNP Kaltara, jalur laut yang paling rawan sekali penyelundupan narkoba.



Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas'ud. Foto: Andri/nvl

“Jadi ini (daerah perbatasan) perlu kita jaga mestinya harus berkali-kali lipat ketimbang daerah-daerah yang berada di jalur nasional. Karena jalur nasional itu otomatis mendapatkan pasokan narkoba dari jalur internasional, artinya di sini harus lebih diperketat penjagaannya berkali-kali lipat baik personelnnya, sarana dan prasarananya termasuk juga adalah yang paling utama politik anggaran. Bagaimana harus berpihak kepada daerah-daerah perbatasan agar mengurangi jumlah narkoba yang ada di nasional,” tegas Rudy.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu menambahkan, kendati di jalur internasional hubungan Indonesia dengan Malaysia cukup baik,

namun karena adanya daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga perlu ada penjagaan yang ketat di Kaltara untuk meminimalisir masuk dan keluarnya barang haram tersebut.

“Bagaimana realisasinya, perlu diketahui bahwa Kalimantan Utara ini sangat luas dan jumlah personel yang ada apakah itu di kepolisian, kejaksaan termasuk di BNNP itu sangat minim. Jadi memang perlu kerja semua pihak untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan narkoba. Untuk itu perlu dukungan di seluruh instansi kepala daerah yang ada di Kalimantan Utara untuk mendukung pemberantasan narkoba,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur itu. ■ man/sf

**W**akil Ketua Komisi IV DPR RI Rusdi Masse Mappasessu memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke PT Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Rusdi menuturkan, melalui kunjungan kerja ini Komisi IV DPR RI ingin menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan PT Semen Tonasa telah melakukan pengelolaan limbah sesuai aturan dan turut serta mewujudkan lingkungan hidup yang sehat.

Salah satu yang menjadi sorotan Tim Kunker Komisi IV DPR RI ialah penampungan batu bara milik PT Semen Tonasa yang kerap dikeluhkan warga sekitar. Pasalnya, penampungan tersebut menimbulkan polusi udara berupa tebaran debu batu bara.

“Kami turun langsung di lapangan dan melihat apa yang menjadi keluhan masyarakat sekitar di sini. Kami melihat, di belakang ini abu batubara suka terbawa angin hingga ke pemukiman penduduk. Namun, kami juga lihat PT Semen Tonasa sudah memasang alat

# Komisi IV Tinjau Penampungan Batu Bara Semen Tonasa

jaring serta menurunkan ketinggian tumpukannya,” ujar Rusdi di sela-sela peninjauan ke PT Semen Tonasa, Pangkep, Sulsel, Minggu (20/2).

Rusdi mengapresiasi langkah Semen Tonasa dalam merespon keluhan warga. Menurutnya, perusahaan telah memberikan solusi dengan menurunkan ketinggian batu bara serta memasang jaring agar debu batu bara tidak berterbangan ke pemukiman warga. Meski demikian, ia juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar tetap mengawal permasalahan tersebut.

“KLHK juga tetap mengawal bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada sekarang ini dan pihak Semen Tonasa juga berjanji untuk menyelesaikan masalah pencemaran ini sesegera mungkin,” kata Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI ini.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang mengeluhkan masalah limbah di PT Semen Tonasa. Ia mendorong pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Politisi PKS ini mengatakan, kehadiran PT Semen Tonasa yang juga merupakan Badan Usaha Milik Negara harus berkomitmen terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kehadiran perusahaan, memang seharusnya membawa manfaat warga sekitar, sehingga apapun aktivitasnya akan didukung sehingga terjadi harmonisasi secara sosial,” katanya. Akmal menambahkan, bahwa tim Komisi IV yang hadir pada kunjungan kali ini bersepakat, bahwa semua temuan yang ada akan menjadi pembahasan di ruang sidang DPR RI. Menurutnya, dengan melihat kondisi secara langsung, maka data yang diperoleh akurat.

“Saya kira ini bentuk pengawasan dari DPR untuk memastikan bahwa pabrik ini tidak menyebabkan masalah lingkungan, baik limbah maupun polusi udara. Kami juga mendorong agar PT Semen Tonasa dapat meningkatkan status propertinya menjadi emas. Artinya, bahwa pengelolaan lingkungan hidupnya sesuai standar KLHK,” imbuh legislator dapil Sulsel II ini. ■ ann/sf



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Rusdi Masse Mappasessu saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI meninjau ke PT Semen Tonasa. Foto: Anne/hvl

# Komisi IV Apresiasi Pemulihan Mangrove di Sumut



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau mangrove di Sumatera Utara. Foto: Ayu/invl

**W**akil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengapresiasi program rehabilitasi atau pemulihan mangrove bagi ketahanan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) di Sumatera Utara. Sebagaimana diketahui, mangrove dapat menyimpan banyak oksigen, sekaligus mengurangi emisi karbon.

“Dalam kunjungan kerja reses kali ini kami melihat secara langsung salah satu contoh program pemulihan mangrove yang dilakukan oleh BRGM di Sumatera Utara ini. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden, dan tentunya Komisi IV DPR untuk mengendalikan perubahan iklim salah satunya dengan cara rehabilitasi mangrove,” ujar Anggia saat memimpin kunjungan kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Sumut, Senin (21/2).

Terlebih lagi saat ini Indonesia menjabat Presidensi G20 mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, dimana Indonesia perlu menunjukkan ke dunia internasional

”

**DARI HASIL DISKUSI DENGAN PETANI MANGROVE, KAMI MENDAPAT INFORMASI BAHWA DALAM PROYEK INI PETANI DIBATASI Pengerjaannya HANYA SEBATAS DUA BULAN. TENTU HAL INI CUKUP KAMI DISAYANGKAN**

betapa besar kepedulian Indonesia terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, dengan adanya pemulihan mangrove juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Di mana dalam kawasan mangrove bisa dibudidayakan tambak ikan dan kepiting.

Sayangnya, dari hasil peninjauan ke lokasi ditambah diskusi langsung dengan petani mangrove diketahui bahwa proyek ini hanya berlangsung selama dua bulan. Padahal dalam proses pemulihan atau rehabilitasi mangrove banyak tahapan yang harus dilalui, sehingga butuh waktu yang lebih juga agar mangrove dapat tumbuh besar.

“Dari hasil diskusi dengan petani mangrove, kami mendapat informasi bahwa dalam proyek ini petani dibatasi pengerjaannya hanya sebatas dua bulan. Tentu hal ini cukup kami disayangkan, mengingat untuk bisa tumbuh besar butuh waktu pemeliharaan yang lebih dari dua bulan. Mangrove usia dua bulan hanya tumbuh beberapa sentimeter saja, dan itu masih sangat rentan untuk rusak dan mati,” jelas politisi PKB ini.

Selain itu, Komisi IV DPR juga menerima masukan dari petani, terkait perbaikan jalan atau infrastruktur menuju lokasi. Hal ini diakui Anggia memang bukan wewenang dari BRGM. Namun tentu harus dikoordinasikan dengan instansi berwenang, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Turut hadir sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI, seperti Djarot Syaiful Hidayat, Salim Fakhry, Hanan Rozak, Dwita Ria Gunadi, Endang Setyawati Thohari, Julie Sutrisno, Luluk Nur Hamidah, Slamet, dan Johan Rosihan. ■ ayu/sf

# Komisi V Nilai Infrastruktur Bandara I Gusti Ngurah Rai Siap Hadapi Presidensi G20



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae memimpin Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI melakukan peninjauan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Foto: Rizki/nvl

**T**im Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI melakukan peninjauan terhadap dukungan infrastruktur transportasi udara di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dalam rangka persiapan penyelenggaraan sejumlah acara internasional yang akan digelar di Bali. Salah satunya puncak acara Presidensi G20 Tahun 2022 yang akan digelar November mendatang.

“Fokus kunjungan kali ini juga untuk meninjau kesiapan Pemerintah Indonesia di Provinsi Bali sehubungan dengan persiapan infrastruktur untuk menghadapi gelaran kegiatan Presidensi G20 pada tahun 2022 ini,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae usai memimpin peninjauan

di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali (21/2).

Terdapat sejumlah hal yang menjadi sorotan Komisi V DPR RI pada peninjauan ke bandara tersebut, di antaranya kesiapan infrastruktur penerbangan, pelayanan pengguna dan tamu VVIP, serta penerapan protokol kesehatan di bandara.

Ridwan Bae mengingatkan, persiapan infrastruktur untuk menyambut sejumlah Kepala Negara Anggota G20 dan tamu VVIP dari seluruh negara yang akan hadir di Pulau Dewata dalam forum internasional tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

“Sebagai ajang pertemuan tingkat tinggi pemerintahan dari berbagai negara, tentunya membutuhkan

perhatian serius dari Negara penyelenggara, yang kali ini adalah Indonesia,” tegas politisi Partai Golkar tersebut. Berdasarkan tinjauannya, Ridwan Bae melihat seluruh infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sudah sangat siap untuk menerima kehadiran tamu G20.

Oleh karena itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara itu meyakini bahwa nantinya pelaksanaan puncak acara Presidensi G20 di Bali tidak akan menemui hambatan. “Kami percaya bahwa dalam pelaksanaan G20 ini tidak akan terhambat

sedikit apapun dan bahkan saya percaya Indonesia akan mendapat nama yang baik di mata para kepala negara dunia,” yakin Ridwan Bae.

Secara pribadi, Ridwan Bae berharap dengan kesiapan seluruh infrastruktur dan pelayanan prima yang dilakukan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, akan membuat nama Indonesia semakin baik dan nantinya akan menarik para negara maju yang tergabung dalam Forum G20 untuk berinvestasi di Indonesia. “Hampir 80 persen (investasi) dikuasai oleh seluruh negara yang tergabung dalam G20, oleh karena itu G20 harus diterima dengan baik, perlakuan baik dan keramah tamahan sehingga negara-negara maju ini tertarik menginvestasikan modalnya di Indonesia,” pungkasnya. ■ rr/sf

# Pemkab Jombang Harus Punya Skema Pembangunan Infrastruktur yang Strategis

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi mengatakan,

Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, memiliki posisi strategis sebagai perlintasan antara jalur utara dengan selatan di Jatim. Hal ini tentu membutuhkan satu perencanaan ataupun juga skema pembangunan infrastruktur yang baik dan strategis.

Arwani mengatakan, untuk memberikan pelayanan kepada publik yang lebih baik, baik dari sisi pelayanan di bidang transportasi dan termasuk juga pelayanan di bidang infrastruktur yang lainnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang perlu merespon beberapa kebutuhan yang nantinya dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah pusat.

Demikian diungkapkan Arwani saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan Bupati Jombang, di Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (21/2). Pertemuan ini turut dihadiri mitra Kerja Komisi V DPR RI, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDTT, Basarnas, hingga BMKG.

“Dari pertemuan ini, baik dari teman-teman kementerian juga sudah mendengarkan dan

menerima apa yang menjadi usulan dari Bupati Jombang. Saya kira dari pemaparan Bupati, ia ingin kolaborasi antara pemerintah pusat



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi. Foto: Dipa/rvi

dan daerah dapat berjalan dengan baik. Terutama progress tentang bagaimana keseluruhan pengelolaan pemerintahan di masa pandemi,” tutur Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI ini.

Usai dialog dengan Bupati dan Wakil Bupati beserta Forkopimda Jombang, jajaran Komisi V DPR RI meninjau Jembatan Ploso yang sudah rampung seratus persen pekerjaannya. Dalam hal ini, Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati juga menambahkan,

keterlibatan yang baik antara daerah dan *stakeholder*, berimbang pada percepatan pembangunan di Jombang.

“Kita bisa lihat jembatan Ploso di Jalan Arteri ini, memang semula sempit sekali. Namun, sekarang kami melihat sudah dikerjakan dengan baik oleh seluruh *stakeholder*, termasuk dari kepolisian yang turut mengatur laju arus kendaraan. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Jombang juga sangat proaktif untuk bisa turut serta memberikan dukungan, agar pembangunan segera terselesaikannya,” tutur Estu, sapaan akrabnya.

Legislator dapil Jatim VIII ini melanjutkan, diperlukan tambahan adanya perluasan dan pelebaran jalan. Jembatan Ploso ini merupakan satu-satunya jembatan yang menghubungkan antara utara Brantas

dan selatan Brantas, dan satu-satunya yang menghubungkan Jombang menuju Tuban, Babat, Lamongan, hingga Bojonegoro.

“Semua akses antar-daerah lewat (Jombang) sini. Jadi apabila jembatan ini tidak dibangun, kemudian terjadi kerusakan di Jembatan Lama, maka seluruh akses terputus. Hal ini juga sekaligus dapat memutuskan dan menghentikan pertumbuhan perekonomian masyarakat, khususnya di utara Jombang,” tegas Estu. ■ dip/sf

# Komisi VI Dorong BNI dan Himbara Permudah Akses Kredit Masyarakat Sulsel

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyoroti maraknya kasus pinjaman *online* (pinjol) di Provinsi Sulawesi Selatan. Ia mendorong Bank Negara Indonesia (BNI) serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya untuk membuat dan memiliki produk pinjaman yang *accessible*, lebih murah, mudah dan cepat agar masyarakat di Sulsel khususnya bisa mendapatkan pinjaman uang dengan mudah sehingga tidak terjerat pinjol.

Demikian disampaikan Martin usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan Eselon 1 Kementerian Investasi/BKPM, Eselon 1 Kementerian BUMN, Pimpinan PT BNI (Persero) Tbk Wilayah 07, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Makassar, Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Dirut Perum Perikanan Indonesia (Perindo) di Kota Makassar, Sulsel, Jumat (25/2).

“BNI harus lebih baik melakukan fungsinya terkait korporasi, terutama dalam pengembangan ekonomi di kawasan Indonesia timur ini. Kita menyoroti peran BNI dalam melakukan edukasi untuk literasi keuangan karena kita mendapati di Sulawesi Selatan ini banyak juga kasus terkait pinjol. Jadi itu termasuk salah satu peran yang harus dilakukan BNI, mungkin juga harus bersama-sama dengan Himbara lainnya seperti BRI, harus bisa memiliki produk-produk (untuk pinjaman) yang lebih murah, mudah dijangkau oleh masyarakat,” ungkap Martin.

Lebih lanjut, politisi Partai NasDem ini menuturkan bahwa Komisi VI DPR



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja di Makassar, Sulsel. Foto: Novel/nvl

RI hendak mengkomunikasikan hal tersebut pada *holding ultra mikro* yang telah dibentuk oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menyarankan BUMN untuk dapat membuat diversifikasi produk pinjaman.

“Nah ini nanti mau kami *connect*-kan, juga mungkin ke *holding ultra mikro* yang sudah dibentuk oleh Kementerian BUMN. Dari sisi BUMN-nya sendiri harus membuat diversifikasi produk dan juga lebih mudah diakses masyarakat jadi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman lebih mudah, murah, cepat. Itu harus bisa disediakan oleh Himbara ini sehingga masyarakat tidak terjebak ke dalam pinjol,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti A.N. Anam juga menyinggung persoalan masyarakat yang terjerat pinjol dan meminta BNI

untuk mempermudah akses kredit kepada masyarakat yang memerlukan pinjaman uang sebagai kebutuhan hidup maupun usaha. Menurutnya dengan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI sebesar 6 persen tidak terlalu tinggi, namun cukup sulit diakses masyarakat.

“Banyak masyarakat di daerah sekarang ini terjerat pinjol. Kita tahu suku bunga KUR BNI (sebesar) 6 persen iya, sangat murah tapi kalau susah untuk apa? Apa strategi BNI dalam mensiasati bagaimana rakyat bisa mengakses kredit seluas-luasnya? Dan harapan kami masyarakat yang perlu (uang) Rp2-3 juta untuk dapat dikasih. Jangan sepelekan rakyat kecil, mereka perlu dibantu, perlu didorong bagaimana mendapatkan kredit murah tapi dapat aksesnya mudah,” tandas politisi PDI-Perjuangan itu. ■nvl/sf



# Komisi VI Minta Pembangunan SRG Disesuaikan dengan Tempatnya

**A**nggota Komisi VI DPR RI Bambang Heri Purnama menyoroti banyaknya pembangunan Sistem Resi Gudang (SRG) yang tidak disesuaikan dengan tempatnya. Hal tersebut berdampak pada kurang optimalnya fungsi dari SRG itu sendiri. Ia mencontohkan kasus yang terjadi pada SRG di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan.

Anggota Komisi VI DPR RI  
Bambang Heri Purnama.  
Foto: Fitri/mvi

Kondisi infrastruktur di wilayah tersebut menurutnya memerlukan perhatian dari pemerintah. Seperti kondisi jalan menuju fasilitas SRG yang tidak layak untuk dilewati.

Terlebih usai terdampak banjir yang turut menyebabkan komoditas pangan di SRG wilayah itu mengalami kerusakan. “Karena banyak gudang daerah Batola, di situ fungsinya kurang karena jalan menuju gudang itu tidak layak untuk

dilewati apalagi daerah situ kemarin habis kena banjir,” jelas Bambang saat mengikuti agenda kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (21/2).

Pada kunjungan tersebut, politisi Partai Golkar itu menekankan, seharusnya penyesuaian tempat pembangunan fasilitas SRG menjadi

”

**(LAHAN) ITU HIBAH DARI MASYARAKAT, SEHARUSNYA ADA TINDAKLANJUT KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH,**

perhatian serius. Tak hanya soal tempat, perawatan dari SRG ini juga harus mendapat perhatian yang sama. Terlebih, lahan yang digunakan merupakan hibah dari masyarakat. “(Lahan) itu hibah dari masyarakat, seharusnya ada tindak lanjut kerja sama dengan pemerintah daerah,” jelas Bambang Heri.

Agar SRG dapat berfungsi maksimal, ia menyebut Komisi VI DPR akan memberikan dukungan.

“Sesuai dengan laporan nanti kita akan membantu lah, mungkin seperti anggaran atau gimana, tapi dia (pemangku kepentingan) harus meyakinkan Komisi VI DPR juga,” tandas legislator dapil Kalsel I tersebut. ■

srw/sf



**W**akil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhiela

Fararez mengatakan, untuk memastikan penyelenggaraan IPU Assembly ke-144 pada 20-24 Maret 2022 mendatang berjalan lancar, tim BKSAP mendampingi Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus meninjau langsung persiapan *venue* IPU Assembly ke-144 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Senin (21/2).

Selain meninjau *venue*, Puan dan Tim BKSAP juga menggelar rapat koordinasi dengan para *stakeholder* untuk membahas berbagai hal yang perlu dipersiapkan dalam acara yang nantinya akan mempertemukan Parlemen dari seluruh dunia tersebut. “Hari ini kita sudah rapat dengan Ketua DPR, sekaligus melihat *venue*-nya, untuk nanti diadakan IPU ke-144. Menurut arahan dari Ketua DPR, kita harus memastikan bahwa nantinya proses kedatangan delegasi ke Bali ini bisa lancar, dari datangnya ke *airport* maupun dari *airport* ke hotel,” ujar Gilang.

Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan, IPU Assembly ke-144 ini merupakan *event* terbesar DPR RI di tahun 2022. Oleh sebab itu, *event* internasional ini diharapkan nantinya dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat meyakinkan negara-negara lain untuk datang ke Indonesia terutama Bali, dan meningkatkan kembali pariwisata Pulau Dewata.

“Karena ini merupakan satu *event* yang terbesar tahun ini, jadi harapannya dengan adanya *event* ini dan lancar juga bisa meyakinkan juga kepada negara-negara lain untuk datang ke Bali dan juga menyukseskan pariwisata yang ada di Bali,” harap Gilang.

Lebih lanjut, politisi PDI-Perjuangan ini menilai, meski persiapan hingga saat ini sudah sekitar 80 persen, namun masih memerlukan banyak hal yang harus dipastikan kembali. Untuk itu, dalam waktu dekat, akan diadakan gladi resik

# Pastikan Gelaran IPU Berjalan Lancar, BKSAP Dampingi Pimpinan DPR Tinjau Venue BICC



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhiela Fararez bersama Pimpinan DPR meninjau persiapan penyelenggaraan IPU Assembly ke-144. Foto: Bianca/rvi

dan *testing* beberapa kegiatan agar nantinya pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. “Kita juga harus melakukan gladi resik dan juga harus melakukan *testing*. Karena kadang-kadang kalau hanya ada di rapat saja belum bisa. Makanya kita harapkan ke depannya kita akan melakukan *testing*, agar nantinya kelihatan, kira-kira sesuai apa tidak yang sudah kita rencanakan,” sebutnya.

Terakhir, Gilang berharap pada penyelenggaraan IPU ke-144 nanti, pandemi sudah mulai mereda, sehingga delegasi dapat lebih aman dan nyaman selama berada di Indonesia. “Pasti tetap rencana awal tetap menggunakan (sistem) *bubble*, tapi kita harapkan nantinya ke depannya bulan Maret ini pandemi mulai reda, mulai lega, dan

nantinya delegasi yang datang lebih banyak, sesuai yang kita targetkan,” tutup Gilang.

Selama peninjauan, Gilang bersama dengan Anggota DPR RI Evita Nursanty, Sekreraris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Deputi Bidang Persidangan Damayanti dan Tim BKSAP mendampingi Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus melihat persiapan *venue* utama yang berada di Martapura Hall. Ruangan ini rencananya merupakan hall utama yang akan digunakan selama *event* IPU Assembly ke-144 pada 20-24 Maret 2022 mendatang. Selain melihat Martapura Hall, tim juga melihat kesiapan ruang-ruang lainnya yang akan digunakan para delegasi dalam forum-forum tertentu. ■ [bia/sf](#)

# BURT Harap BK DPR Selalu Terapkan Sistem Bekerja *Plan, Do, and Check*

**W**akil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah berharap institusi Badan Keahlian (BK) DPR RI selalu menerapkan sistem bekerja '*Plan, Do, and Check*' dalam kerangka kerja tahunan. Hal itu penting dilakukan, sebab institusi yang dipimpin oleh Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul ini memiliki fungsi penting dalam rangka menjadi *supporting system* bagi kinerja DPR RI. Baik kinerja DPR RI dari sisi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan kepada pemerintah.

"Memang teorinya adalah *plan, do, check*. Rencanakan, kerjakan, dan evaluasi. Di dalam hal ini, tugas BK DPR RI adalah mulai dari melakukan pendampingan, perencanaan, sampai dengan pengawasan. SDM-nya harus memiliki *skill* yang andal," ujar Dimiyati saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja BK DPR RI bertema 'Evaluasi Program Kerja 2021 dan Rencana Kerja 2022', di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/2).

Karena itu, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini mengapresiasi kinerja dari Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul dan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Sebab, di tangan dua Eselon I tersebut, menurutnya, kinerja kesekretariatan dan BK DPR RI dapat menunjukkan kerja tim yang sangat bagus dan andal sehingga mendapatkan banyak prestasi. "Juga secara institusi, lebih aman, nyaman, dan tenteram," urainya.

Ke depan, Anggota Komisi III DPR RI ini berharap BK DPR RI para analis/peneliti legislasi yang ada di BK DPR

RI dapat bersinergi dengan para Tenaga Ahli (TA) di masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) juga dengan TA Anggota DPR RI. Perlu pula diinventarisasi kembali, TA yang masih dalam kapasitas yang rendah (*low*), menengah (*middle*) dan tinggi (*high*) secara kapasitas.

"Contohnya, harus memiliki keahlian di bidang anggaran. Bagaimana membantu dan mendampingi anggota dalam penganggaran, baik itu di Banggar, BURT, maupun di AKD lainnya. Kerja sama dengan TA-TA nya. Inventarisasi oleh BKD, mana TA yang bagus, memiliki *top, middle*, atau *low skill*," tambah Dimiyati.

Terlebih, jika ada para ahli yang relevan secara akademik dan dapat membantu meningkatkan kinerja Anggota DPR, maka mereka bisa direkrut untuk menjadi bagian dari BK DPR RI. Kalau ada yang ahli-ahli bisa direkrut ke DPR itu yang bisa dilakukan BK DPR. Tapi, tetap koordinasi dengan Pak Sekjen," tutup Dimiyati. ■ rdn/sf



Wakil Ketua BURT  
DPR RI Achmad  
Dimiyati Natakusumah.  
Foto: Ridwan/nvl

# Di Markas PBB, Hafisz Tohir Sampaikan Pancasila Mampu Satukan Masyarakat



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir pada Sidang IPU di markas PBB. Foto: Ist/nvl

**W**akil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad

Hafisz Tohir mengatakan, Pancasila terbukti mampu menyatukan beragam etnis dan kultur masyarakat di Indonesia. Inti ajaran Pancasila

adalah berkeadilan sosial dan saling menghormati perbedaan. Ideologi ini bisa digunakan pula untuk menyatukan bangsa-bangsa di dunia.

“Keadilan sosial dan menghormati perbedaan telah menjadi inti dari ideologi nasional Indonesia, Pancasila, yang mencerminkan bagaimana cara berinteraksi dengan sesame,” kata Hafisz pada Sidang Inter Parliamentary Union (IPU), di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Jumat (18/2).

Pancasila, lanjut Hafisz, juga memperkenalkan konsep kebangsaan di Indonesia. Ada lebih dari 1.300 etnis yang diakui dengan bahasa dan kebudayaannya sendiri. “Inilah persatuan tanpa keseragaman dan perbedaan tanpa perpecahan,” tandas politisi PAN itu lagi. Pancasila, tekannya, mampu menyatukan masyarakat yang berbeda dengan berdasar pada prinsip-prinsip, manusia sebagai pribadi, makhluk sosial, makhluk fisik, dan spiritual.

Hafisz menambahkan, dalam konteks kerja sama internasional, Pancasila juga bisa jadi ideologi bersama untuk menyatukan masyarakat dunia dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. “Kami berharap dapat mewujudkan semangat kerja sama ini pada level internasional. Dan semua upaya multilateral yang kami lakukan dalam proses perbaikan adalah untuk membangun dunia yang lebih tangguh,” pandang legislator dapil Sumatera Selatan I ini. ■ mh/sf



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar (kanan) saat peluncuran CSIRT bersama Sekretaris Utama BSSN. Foto: Jaka/nvl

# Proteksi Sistem Digital, Setjen DPR Luncurkan CSIRT

**S**ekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meluncurkan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) sebagai bentuk proteksi terhadap sistem digital yang ada di lingkungan DPR RI dari serangan-serangan siber. Menurutnya, dengan berbagai pengalaman kasus serangan siber yang dialami DPR RI, dibentuknya tim ini nantinya diharapkan dapat mencegah dan melindungi data informasi dan aktivitas digital di DPR RI.

“DPR ini kan parlemen modern, banyak didukung oleh perangkat-perangkat teknologi digital, nah kita sudah berpengalaman dalam beberapa kasus-kasus besar politik itu. Sistem digital kita adalah sistem wajah kita semua, jika ada masalah semacam serangan-serangan dari luar, ada kerja sama dengan BSSN (Badan Sandi dan Siber Nasional). Atas bantuan BSSN

kita sudah diproses kan diprioritaskan dilakukan protect dengan sistem CSIRT,” ungkapnya usai *me-launching* CSIRT di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2).

Lebih lanjut Indra mengatakan, CSIRT nantinya akan bertugas mem-*protect* sistem digital yang ada di DPR RI. Sehingga paling tidak dapat membantu mencegah serangan-serangan siber yang dapat mengganggu setiap data informasi penting maupun aktivitas-aktivitas digital lainnya.

Untuk itu nantinya diperlukan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang tergabung dalam CSIRT, sehingga ke depan, DPR RI dapat menangani sendiri permasalahan serangan-serangan cyber yang terjadi. “Sistem CSIRT ini kan masih asistensi dengan BSSN, jadi SDM kita nanti akan segera kita perkuat dengan pengetahuan sistem itu, mudah-mudahan dalam tiga bulan ke

depan ini semua sudah berjalan baik,” imbuh Indra.

Terakhir, Indra berharap proteksi dari CSIRT ini nantinya akan membuat dokumen-dokumen penting yang dimiliki DPR RI menjadi lebih aman. “Dengan proteksi CSIRT dari BSSN ini ke depan kita berharap semua persidangan yang sekarang menggunakan cara-cara virtual kemudian juga perangkat-perangkat kita yang menyimpan *server* banyak dokumen-dokumen persidangan akan lebih aman,” tutupnya.

Selain itu, Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak yang juga hadir dalam *launching* tersebut berharap bahwa dengan dibentuknya CSIRT DPR RI ini nantinya dapat membantu menangani berbagai ancaman siber yang terjadi di DPR RI. Sehingga segala aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan terhadap data informasi dan aktivitas lainnya bisa dijaga dengan baik.

“Tim ini diharapkan nantinya ketika terjadi insiden siber di lingkungan DPR, tim dari CSIRT DPR RI ini bisa langsung bereaksi yang mana nanti tingkatan ancaman yang bisa kita bedakan, kalau CSIRT di DPR sudah bisa tangani cukup di DPR, tetapi ketika ini sudah masif luas baru ke CSIRT sektor, nah CSIRT sektor itu ada di BSSN baik CSIRT sektor maupun nasional ada di BSSN,” ungkap Syahrul. ■ [bia,ah/sf](#)

# Evaluasi Program 2021 dan Rencana Kerja 2022 Guna Hadirkan BK DPR yang *Agile* dan Terintegrasi dalam Sistem Informasi



Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul. Foto: Ridwan/nvl

**B**adan Keahlian (BK) DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja Evaluasi Program Kerja 2021 dan Rencana Kerja 2022 guna menghadirkan organisasi yang lebih lincah (*agile*) dan terintegrasi dalam sistem informasi. Kebutuhan akan hal tersebut, menurut Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul, didasari pada kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang luar biasa banyak hingga hampir mencapai 400 orang. Juga secara kualitas, tetap mendukung penuh kebutuhan para anggota dewan, meskipun di masa pandemi saat ini.

“Saya sampaikan, saya hanya ingin tekankan satu hal, yaitu apa yang saya sebut dengan Menuju Badan Keahlian yang *agile* dan sistem informasi yang terintegrasi. Jadi, *agile organization and integrated system information*,” ujar Sensi, sapaan akrab Inosentius, saat memberikan sambutan dalam raker BK DPR RI tersebut, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/2).

Sensi menjelaskan, dalam organisasi yang konvensional, cara kerja disesuaikan dengan tupoksi yang *kekeuh* di masing-masing unit. Dengan kata lain, memiliki paradigma

yang tertutup dan tidak bersinergi dengan pusat-pusat lain di bawah koordinasi BK DPR RI. Karena itu, ke depan, dirancang fokus pada pembentukan tim, baik untuk tim pembentukan Undang-Undang, Naskah Akademik, perumusan Undang-Undang, maupun tim untuk urusan fungsi anggaran dan pengawasan.

“Kalau organisasi yang konvensional itu tupoksinya hanya *kekeuh* di masing-masing unit sesuai dengan tupoksinya, maka ke depan kerja-kerja tim yang menjadi keunggulan, yang menggabungkan SDM dari pusat-pusat yang ada di bawah BKD,” jelas Doktor Bidang Hukum Ekonomi ini.

Ia menambahkan beberapa pusat kajian di bawah BK DPR RI, ada yang sudah mengalami beban berlebihan dalam kinerja (*overload capacity*). Sehingga, dibutuhkan SDM lain baik yang berasal dari peneliti di BK DPR RI maupun dari Tenaga Ahli (TA) di masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD). “Yang kita perlu bantu adalah Pusat Pemantauan Pelaksanaan (Puspanlak) undang-

undang. Itu pekerjaan yang *load*-nya besar sekali, satu tahun saja bisa 80 keterangan DPR untuk sidang di MK. Jadi, ke depan Puspanlak bisa di-back up dengan analisis legislatif dengan PUU juga,” tambah Sensi.

Hadir pula dalam rapat kerja ini, di antaranya Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Kepala Pusat Teknologi Informasi Djaka Dwi Winarko, Kepala Pusat Kajian AKN Helmizar, Kepala Pusat Kajian Anggaran Asep Ahmad Saefullah, Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tanti Sumartini, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Lidya Suryani Widayati, serta Plt Kepala Pusat Penelitian Achmad Sani Alhusein. ■ rdn/sf



# Komisi II Minta Pemerintah Segera Bayar Ganti Rugi Masyarakat Way Abung Lampung Utara



**DENGAN SEMUA DOKUMEN YANG ADA, TENTU PEMERINTAH HARUS MEMBERIKAN HAK DARIPADA RAKYAT DAN DENGAN DOKUMEN YANG ADA ITU**

dalam kurun waktu sesegera mungkin. Dengan dokumen yang ada tidak ada halangan bagi pemerintah untuk tidak membayarkan hak masyarakat Way Abung ini.

“Dengan semua dokumen yang ada, tentu pemerintah harus memberikan hak daripada rakyat dan dengan dokumen yang ada itu menunjukkan tidak ada satu halangan pun oleh pemerintah untuk tidak membayarkan ganti rugi lebih kurang Rp125 miliar kepada masyarakat Way Abung. Kami juga sudah komunikasi dengan Bupati Lampung Utara, dengan Forkopimda termasuk juga Gubernur Lampung untuk sama-sama mengawal agar pembayaran masyarakat itu bisa segera direalisasikan dalam waktu yang sesegera mungkin,” tegasnya.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III tersebut juga akan melanjutkan komunikasi dengan kementerian terkait tentang aspirasi masyarakat Lampung ini. Junimart memastikan pihaknya akan mengadakan rapat pleno dengan Anggota Komisi II DPR RI serta bersurat dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Kita akan membawa aspirasi yang kita dapatkan dalam rapat pendapat atau rapat kerja dengan kementerian terkait dan tentu kita akan melakukan rapat pleno dengan Anggota nanti di Komisi II. Kita akan bersurat kepada Kementerian Keuangan, Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN dalam rangka menyikapi temuan-temuan kita ketika kita berkunjung ke Lampung Utara,” komitmen Junimart. ■ mri/sf



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Tim Kunjuran Reses Komisi II DPR RI mengunjungi masyarakat Desa Way Abung, Lampung Utara. Foto: Tari/nv

**K**omisi II DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Kunjungan kerja ini untuk menindaklanjuti hasil RDPU beberapa bulan lalu di Ruang Rapat Komisi II DPR RI dengan masyarakat Desa Way Abung, Lampung Utara, menyangkut ganti rugi tanah mereka sebanyak 25.000 hektare yang selama ini belum juga diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah.

“Padahal mereka (masyarakat Desa Way Abung) sudah melakukan komunikasi dengan Komisi II DPR RI sebanyak 4 kali dan terakhir dengan Komisi II selama periode kita ini,” jelas Junimart usai menghadiri pertemuan dengan Bupati Lampung Utara Budi Utomo, di Kantor Bupati Lampung Utara, Lampung, Senin (21/2).

Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengimbau pada pemerintah untuk segera membayarkan uang ganti rugi kepada masyarakat Way Abung

# The 144 IPU

**(Inter-Parliamentary Union)  
Assembly & Related Meetings**

*“Getting to Zero: Mobilizing Parliaments  
to Act on Climate Change”*

